

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu faktor krusial yang harus dilaksanakan untuk kepentingan pembangunan daerah, termasuk di dalamnya adalah pengentasan kemiskinan dan kesenjangan, adalah pembangunan desa serta kawasan pedesaan yang dilaksanakan secara komprehensif. Perkembangan jumlah desa di Indonesia mengalami peningkatan secara pesat yang ditandai dengan adanya peningkatan tren pertumbuhan. Perkembangan dan pertumbuhan dalam pengelolaan potensi desa tidak lepas dari proses penggalian dan pemanfaatan potensi desa yang dilakukan oleh pihak terkait. Hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) pada tahun 2020, terdapat 84.038 wilayah setingkat desa yang terdapat pada 7.263 kecamatan, 514 kabupaten/kota, dan 34 provinsi. Dari 84.038 wilayah setingkat desa terdapat 75.535 desa/nagari, 8.452 kelurahan, dan 51 UPT/SPT. (Badan Pusat Statistik, 2021).

Cakupan wilayah Pendataan Potensi Desa adalah seluruh wilayah administrasi setingkat desa yang memenuhi tiga persyaratan yang ditetapkan yaitu: (1) adanya wilayah desa/ kelurahan, (2) penduduk yang menetap, dan (3) ada pemerintahan desa/ kelurahan tanpa melihat SK penetapan desa/kelurahan tersebut. Sehingga wilayah Updating Podes 2020 ini berbeda dengan daftar desa/kelurahan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan yang berisi seluruh

wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan (Badan Pusat Statistik Nasional, 2021).

Pengembangan potensi desa ini merupakan bagian dari upaya proses pembangunan desa. Hal ini termasuk salah satu aspek krusial yang menjadi bagian dari pembangunan nasional. Strategi pembangunan nasional yang tercantum berfokus pada dimensi pemerataan dan kewilayahan, dengan prioritas pembangunan di wilayah desa, wilayah pinggiran, luar jawa, dan kawasan timur. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan di desa dan wilayah pinggiran menjadi agenda utama pada program pembangunan nasional. Pembangunan di wilayah timur, kecuali di pedesaan, pinggiran kota dan Jawa, tidak terlepas dari pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan Indeks Pembangunan Desa di wilayah administrasi pemerintahan desa melalui proses survei di tahun 2021 yang dibandingkan dengan tahun 2020, hasil Indeks Desa Membangun (IDM) menunjukkan peningkatan jumlah desa mandiri sejumlah 1.528 desa dan desa maju sejumlah 3.409, sedangkan desa berkembang menunjukkan penurunan sejumlah 1.946 dan desa tertinggal sejumlah 3.299 desa. Penurunan yang terjadi pada status desa berkembang dan tertinggal tersebut terjadi karena adanya peningkatan pada jumlah desa maju dan mandiri. Di tahun 2021, terdapat tren peningkatan Desa Berkembang dari yang sebelumnya berstatus desa sangat tertinggal dan desa tertinggal, yakni sejumlah 8.779 desa. Di sisi lain, peningkatan status dari desa berkembang dan maju ke desa mandiri sejumlah 2.440 desa. (Kemendesa, 2021).

Kondisi sosial ekonomi masyarakat pedesaan pada umumnya memiliki level di bawah masyarakat perkotaan. Hal tersebut disebabkan oleh beragam faktor, seperti alih fungsi lahan, produktivitas agrobisnis yang rendah, pengaplikasian inovasi serta teknologi pertanian yang sangat minim, dan gejala perubahan iklim. Kondisi tersebut kemudian menyebabkan terjadinya peningkatan tren peralihan lapangan kerja yang sebelumnya didominasi oleh pertanian menjadi nonpertanian. Di samping itu, terdapat tren perpindahan masyarakat desa menuju kota untuk mencari kerja guna memperoleh kehidupan yang lebih layak.

Indeks Pembangunan Desa telah menunjukkan perbaikan status desa. Dari hasil pemutakhiran IDM, sepanjang 2021, jumlah Desa Mandiri bertambah 1.528 desa. Perhitungan ini dilihat dari selisih jumlah Desa Mandiri pada 2021 dengan tahun sebelumnya. Pada 2021, jumlah Desa Mandiri mencapai 3.269 desa atau sebesar 4 persen dari 74.961 desa seluruh Indonesia. Sedangkan pada 2020 lalu, jumlah desa mandiri sebanyak 1.741 desa atau 2,49 persen. (Lubis, 2022).

Merujuk pada gagasan Soleh (2017), pembangunan desa serta kawasan pedesaan merupakan faktor krusial yang harus dilaksanakan untuk kepentingan mengatasi permasalahan yang dialami oleh masyarakat desa. Upaya pembangunan tersebut telah mengalami peningkatan yang ditandai dengan adanya lonjakan kenaikan status pertumbuhan, yakni rata-rata pertumbuhannya adalah 2,29 persen atau 1.409 desa per tahunnya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut

dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam satu dekade ini, pembangunan tingkat desa menjadi salah satu perhatian lebih dalam sistem pemerintahan. Terlebih pada bagaimana desa dapat mengembangkan potensi dan memberikan nilai tambah ekonomi bagi kehidupan masyarakat yang ada. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa pemerintah akan mengalokasikan Dana Desa melalui mekanisme transfer kepada Kota/Kabupaten. Selain itu, momentum tersebut juga diikuti dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang berkaitan dengan Pendirian, Pengurusan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Diharapkan melalui kedua amanat yang digagas oleh pemerintah, perhatian pemerintah terhadap pembangunan desa tidak hanya menjadi visi semata. Selain itu, diharapkan adanya pembentukan BUMDes dapat mengelola ekonomi masyarakat desa dan menjadikan desa lebih produktif (Nugrahaningsih & Muttaqin, 2018).

Mayoritas masyarakat Indonesia bertempat tinggal di pedesaan, sehingga hal tersebut seharusnya menjadi sebuah alasan penguatan perekonomian di desa untuk kepentingan mewujudkan stabilitas perekonomian masyarakat. Ketentuan terkait

pengelolaan sumber dana desa dan penyelenggaraan pembangunan termaktub pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Alokasi dana desa tersebut diaplikasikan untuk kepentingan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa. Merujuk pada hal tersebut, maka pemerintah desa harus mampu menganalisis potensi desa, kemudian melaksanakan upaya pengembangan potensi tersebut. Tujuannya adalah untuk kepentingan terwujudnya kemandirian masyarakat desa (Soleh, 2017).

Melalui pengelolaan BUMDes, masyarakat desa dapat memanfaatkan dana desa yang dikucurkan untuk kepentingan penciptaan kemandirian masyarakat desa. Salah satu hal yang dapat dikembangkan BUMDes melalui dana desa adalah kemungkinan adanya pariwisata di desa khususnya wisata edukasi yang menjadi perhatian umum akhir-akhir ini (Kurnia et al., 2021). Di mana wisata edukasi yang ada di desa merupakan bagian langsung dari sektor pariwisata yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pengembangan pariwisata pedesaan tersebut diekspresikan dapat menjadi role model bagi pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pada sektor pariwisata (Sari & Nabella, 2021). Menurut (Pamungkas & Muktiali, 2015), desa wisata dapat dideskripsikan sebagai suatu kawasan pedesaan yang menyuguhkan pariwisata bertema kehidupan sosial masyarakat desa. Keberadaan desa wisata tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat desa telah memiliki kesadaran untuk mengembangkan potensi desa dan mampu bersaing dengan pariwisata perkotaan.

Merujuk pada gagasan Suranny (2021), saat ini justru telah banyak desa yang tidak lagi menerima dana desa karena mereka telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pengelolaan potensi daerah dengan mengembangkan desa wisata.

Upaya pengembangan wisata desa tersebut dapat dijadikan sebagai media pengembangan potensi masyarakat. Hal ini karena pengembangan berbasis agrowisata tersebut melibatkan peran masyarakat setempat. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian terkait upaya mendorong masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dan kontinyu, sehingga potensi tersebut dapat dikembangkan secara massif dan berkelanjutan. Merujuk pada hal tersebut, maka upaya pengembangan tersebut merupakan upaya yang tidak dapat memisahkan setiap elemen di dalamnya, yakni potensi wisata dan potensi masyarakat (Komariah, Saepudin, & Yusup, 2018).

Keberadaan BUMDes juga dapat dikatakan sebagai bentuk kemandirian desa. Di mana dengan BUMDes, desa yang bersangkutan dapat mengembangkan daerahnya. Artinya, BUMDes tidak hanya menjadi bentuk lembaga usaha desa yang bergerak secara formal, melainkan secara langsung juga melibatkan keikutsertaan masyarakat desa untuk bersama-sama mengembangkan desanya. Dengan kata lain, "Dari Desa untuk Desa". Terlebih, setidaknya terdapat berbagai cara yang dapat BUMDes kembangkan untuk mencapai visi tersebut, salah satunya adalah melalui pengembangan wisata. Hal tersebut dikarenakan wisata desa menjadi hal yang menarik dan potensial jika dapat dikelola dengan baik.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa belum terdapat aturan spesifik terkait pengaturan Desa/Kelurahan. Merujuk pada hal tersebut, maka terdapat penjabaran yang lebih spesifik pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, tepatnya pada pasal 18 yang mengatur kewenangan pemerintah desa untuk membangun desanya, yakni penyelenggaraan pemerintaah, pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Merujuk pada banyaknya wewenang dan tanggung jawab tersebut, maka perlu adanya penyusunan langkah strategis untuk mencapai hasil yang optimal terkait dengan wewenang dan tanggung jawab tersebut. Langkah tersebut terkait dengan pengembangan dan pemberian impuls positif terhadap masyarakat agar memiliki kompetensi untuk dapat berdikari, salah satunya adalah dengan dibentuknya desa wisata (Trisnawati et al., 2018).

Menurut Perdana (2019), pariwisata perdesaan merupakan wisata yang dikembangkan di daerah desa serta melibatkan masyarakat setempat dan berbagai mitra untuk dapat mengembangkan potensi desa yang bersangkutan. Sementara Eduwisata sendiri merujuk pada jenis wisata yang menonjolkan nilai edukasi dan konservasi di dalamnya. Hal tersebut secara jelas dijelaskan oleh (Haryanto, 2014) bahwa Lontar Sewu menjadi bentuk perjalanan wisata ke wilayah alam dan dilakukan dengantujuan mengkonservasi lingkungan serta melestarikan kehidupan dan kesejahteraanpenduduk setempat. Berdasarkan definisi tersebut, ditekankan kembali bahwa Lontar Sewu juga mengedepankan kesejahteraan masyarakat setempat di samping melestarikan dan mengkonservasi lingkungan. Salah satu

contoh objek wisata yang ada di Indonesia adalah objek wisata Lontar Sewu yang berada di Desa Hendrosari, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik.

Merujuk pada gagasan Anshar (2015), pariwisata dideskripsikan sebagai fenomena sosial yang memiliki kompleksitas serta keterkaitan terhadap kehidupan manusia. Pariwisata juga dideskripsikan sebagai serangkaian aktivitas terkait penataan serta pelayanan terhadap upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan wisata, sehingga hal tersebut menyuguhkan dampak terhadap nilai masyarakat, baik dampak positif maupun negatif.

Desa Hendrosari merupakan salah satu desa wisata di Kabupaten Gresik dengan jumlah penduduk sebanyak 2.408 jiwa. Desa Wisata ini dikenal karena keberadaan objek wisata Lontar Sewu yang telah dirancang sejak tahun 2013. Di mana lokasi Lontar Sewu tersebut berdiri di atas tanah seluas Sembilan puluh hektar dan masih ditanami Pohon Lontar sebagai salah satu produk unggulannya yang sekaligus menjadi sumber Legen. Selain itu, berdasarkan profil desa Hendrosari, setidaknya terdapat 718 penduduk yang tidak bekerja atau mengurus rumah. Dengan kata lain, di desa tersebut masih relative banyak ditemukan warga desa yang tidak produktif biarpun usianya termasuk usia kerja. Melalui potensi geografis yang dimiliki oleh Desa Hendrosari, objek wisata Lontar Sewu menjadi produk wisata desa potensial untuk dikembangkan. Dirujuk dari laman berita Detik.com oleh Sofuroh (2020),

“Objek wisata Lontar Sewu menjadi bentuk gagasan realis baru bagi Desa Hendrosari dalam mengembangkan potensi alam. Selain itu, disebutkan bahwa Desa Hendrosari menjadi lebih potensial untuk dikembangkan karena tidak hanya memiliki potensi geografi melainkan memiliki Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes) yang tepat menjadi eksekutor dari gagasan realis tersebut. Dalam berita tersebut juga dijelaskan bahwa, adanya pembukaan objek wisata edukasi tidak hanya akan mengedukasi pengunjung, tetapi juga memberikan edukasi kepada pengurus dan masyarakat sekitar. Edukasi yang dimaksud adalah edukasi yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan organisasi dalam pengurusan objek wisata edukasi. Kemudian, dijelaskan juga bahwa wisata menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang tidak terdampak krisis, terlebih dengan adanya sektor kuliner di daerah wisata tersebut. Selain itu, dengan adanya objek wisata Lontar Sewu tentunya diharapkan produk unggulan desa akan lebih dikenal dan memberikan nilai ekonomi kepada masyarakat setempat.” (Sumber: <https://news.detik.com/berita/d-4892824/mendes-pdtt-resmikan-wahana-edu-wisata-lontar-sewu-di-gresik> diakses pada 10 Maret 2022 pukul 14:55)

Hal tersebut telah sesuai dengan yang dilontarkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim pada Senin (10/2/2020), yaitu:

"Satu hal saja sudah tepat. Apalagi, Desa Hendrosari ini memiliki dua hal tersebut. Ini adalah suatu pilihan yang tepat. Jadi, wisata disini sangat luar biasa. Desa ini sudah memiliki BUMDes yang bagus dengan mengelola desa wisata. Apalagi, desawisata dibangun atas dasar permasalahan dan potensi. Ini adalah suatu pendekatan yang sangat tepat". Ia juga mengapresiasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lontar Sewu yang terus berinovasi dalam mengembangkan usahanya. (Sumber: <https://news.detik.com/berita/d-4892824/mendes-pdtt-resmikan-wahana-edu-wisata-lontar-sewu-di-gresik> diakses pada 6 Oktober 2021 pukul 16:23)

Hal serupa juga diberitakan pada laman berita Antaranews oleh Ibrahim (2020), di mana menyatakan bahwa objek wisata Lontar Sewu juga memberikan nilai ekonomi dan edukasi. Terlebih, lokasi wisata yang jauh dari kebisingan akan membangun suasana edukasi menjadi lebih efisien dan efektif. Selain itu, dipaparkan bahwa objek wisata Lontar Sewu dapat menjadi produk unggulan desa. Hal tersebut mengingat konsep yang dibawa dari objek wisata tersebut

melibatkan berbagai pihak. Desa Hendrosari telah berusaha membuktikan adanya potensi yang terus dikembangkan untuk menjadi inkubasi bisnis berbasis objek wisata. Hal tersebut sesuai dengan yang di sampaikan oleh Kepala Desa Hendrosari, Asna Hadi Saputra, yaitu:

"Kami bersama masyarakat tergerak untuk mengubah cara pandang terhadap desa kami, dan mengubahnya menjadi peluang untuk mendatangkan wisatawan, sehingga ada perputaran uang di dalam desa," (Sumber: <https://m.antaranews.com/amp/berita/1292818/lontar-sewu-desa-yang-dulu-dikenal-memabukkan-kini-jadi-jujukan> diakses pada 6 Oktober 2021 pukul 16:47).

Jika kembali ke beberapa waktu silam, objek wisata Lontar Sewu merupakan wisata yang berdiri sejak tahun 2017 dan mulai dikelola BUMDes pada tahun 2019. Lokasi wisata tersebut terletak pada lahan dengan luas 6 hektar yang dikelola dengan mekanisme kemitraan antara masyarakat, pemerintah desa, dan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PTT). Setidaknya terdapat 3600 pohon lontar dan 119 petani yang bergabung dalam mitra pengembangan Lontar Sewu tersebut. Di mana, dari situlah nama Lontar Sewu (Seribu Lontar) berasal. Sementara objek wisata diangkat dari keberadaan pohon- pohon lontar yang hingga saat ini menghasilkan legen dan buah siwalan yang mana menjadi objek edukasi yang dapat ditawarkan. Sementara berdasarkan laporan berita dari Antaranews Ibrahim (2020):

“Keberadaan objek wisata Lontar Sewu telah merubah Sembilan puluh derajat penampilan desa yang dulunya gersang dan dikenal dengan produk fermentasi silawak yang memabukkan menjadi kawasan hijau dan layak dikunjungi. Setidaknya semenjak objek wisata Lontar Sewu dibuka, jumlah pengunjung yang datang ke tempat tersebut meningkat secara perlahan. Berikut merupakan jumlah pengunjung objek wisata Lontar sewu baik dari Tiket Masuk maupun Pengunjung penikmat wahana yang

disediakan.”

(Sumber: <https://www.antaranews.com/berita/1292818/lontar-sewu-desa> yang-dulu-dikenal-memabukkan-kini-jadi-jujukan diakses pada 10 Maret 2022 pukul 15.22

Tabel 1.1 Jumlah Pengunjung Objek Wisata Lontar Sewu Juli-Oktober 2021

	Kategori	Bulan			
		Juli	Agustus	September	Oktober
	Tiket Masuk	856	450	38.457	46.856
	Kereta Sawah	470	28	12.539	19.710
	Sky Bike	237	18	5.560	6.231
	Carousel	268	29	7.492	12.057

Sumber : BUMDesa Lontar Sewu 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat dikatakan bahwa Lontar Sewu merupakan objek wisata yang menarik perhatian masyarakat. Walaupun, pada bulan Juli-Agustus jumlah pengunjungnya sangat sedikit, jumlahnya meningkat signifikan pada bulan September hingga Oktober. Hal ini tentunya menjadi potensi tersendiri bagi objek wisata Lontar Sewu untuk dapat dikembangkan kedepannya. Sejalan dengan hal tersebut, berikut merupakan tabel pendapatan Objek Wisata Lontar Sewu selama beroperasi dari bulan Juli-Oktober 2021.

Tabel 1.2 Jumlah Pendapatan Objek Wisata Lontar Sewu Juli-Oktober 2021

	Kategori	Bulan			
		Juli	Agustus	September	Oktober
	Tiket Masuk	Rp8.560.000	Rp4.500.00	Rp384.570.000	Rp468.560.000

Kereta					
Sawah	Rp7.050.000	Rp.420.000	Rp.188.085.000	Rp.296.650.000	
Sky Bike	Rp.5.925.000	Rp.450.000	Rp.139.000.000	Rp.155.775.000	
Carousel	Rp.2.680.000	Rp.290.000	Rp.74.920.000	Rp120.570.000	

Sumber : BUMDesa Lontar Sewu 2021

Dengan pendapatan yang sedemikian rupa, tidak heran jika Objek Wisata Lontar Sewu dapat menjadi stimulus bagi pemerintah setempat untuk mengentaskan masalah kemiskinan dan memperbaiki perekonomian desa setempat. Hal ini sejalan dengan pemaparan berita yang dipublikasikan oleh Sindonews.com yang ditulis oleh Yuswantoro (2020):

“Dengan model pengembangan wisata bermitra akan membangun hubungan-hubungan baru yang berpotensi dalam meningkatkan perekonomian di Desa Hendrosari.” (Sumber: <https://daerah.sindonews.com/artikel/jatim/28273/bumdes-lontar-sewu-sulap-tanah-lapang-jadi-edu-wisata?showpage=all> diakses pada 10 Maret 2022, pukul 15.31).

Salah satu contoh konkret dari hal tersebut adalah Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan Usaha Ekonomi Desa (PUED). Agenda tersebut dideskripsikan sebagai salah satu program pemerintah yang dicanangkan untuk kepentingan pendorongan pengembangan potensi desa melalui kemitraan Koperasi Usaha Ekonomi Mikro Desa (KUEMD) termasuk koperasi, lembaga ekonomi desa (BUMDes), dan Pelaku Bisnis Profesional dengan mekanisme kerja sama. Melalui program tersebut, terciptalah pelaku kemitraan sebagai pengelola objek

wisata Lontar Sewu. Objek Wisata Lontar Sewu tersusun atas beragam unit usaha, seperti parkir, karcis, wahana permainan, kios, gazebo, serta kafe. Sehingga dapat disimpulkan bahwa objek wisata Lontar Sewu tidak hanya mengembangkan potensi desa berbasis edukasi. Namun, Keberadaan objek wisata Lontar Sewu di Desa Hendrosari secara bertahap telah meningkatkan perekonomian daerah setempat (Yuswantoro, 2020).

Selain dana desa, BUMDes memiliki peran vital dalam pembangunan desa wisata, khususnya objek wisata Lontar Sewu. Dalam hal ini, BUMDes Hendrosari memiliki target untuk meningkatkan perekonomian desa. Selain itu, BUMDes juga memiliki target untuk mengelola potensi desa selaras dengan kebutuhan masyarakat Desa Hendrosari dan mendorong pendapatan asli desa (PAD) (Fadhilah et al., 2021). Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang tepat untuk mencapai target-target yang diharapkan. Strategi yang dimaksud berupa langkah-langkah yang dapat BUMDes terapkan untuk dapat menyelaraskan peran dari masing-masing mitra dan target dari objek wisata Lontar Sewu itu sendiri. Selain itu, strategi tersebut juga dapat menjadi jalan yang dapat BUMDes siapkan dalam mengembangkan Objek Wisata Lontar Sewu di Desa Hendrosari.

Walaupun pengembangan Objek Wisata Lontar Sewu di Desa Hendrosari menunjukkan kenaikan yang signifikan melalui jumlah pengunjung wisatawan, bukan berarti lokasi ini tidak terdapat masalah yang harus dihadapi oleh BUMDes. Masalah lokal yang terjadi pada lokasi ini adalah penataan lapak penjual yang tidak tertib sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas di sekitar objek wisata. Permasalahan ini membutuhkan peran yang kuat dari BUMDes

guna mewujudkan solusi yang tidak merugikan antar pihak mengingat bahwa Kabupaten Gresik merupakan salah satu kabupaten yang memiliki objek wisata cukup banyak dan mendapat penghargaan Adipura Bangunpraja sebagai kebersihan kota.

Jika ditinjau dari segi fasilitas, di Wisata Lontar Sewu untuk sebuah fasilitas belum memadai dan parkir untuk bus masih belum ada, untuk parkir sepeda motor dan mobil sudah tersedia akan tetapi tidak luas. Kekurangan fasilitas ini sesuai dengan ulasan yang disampaikan oleh Rinaldo selaku wisatawan Lontar Sewu yang mengatakan bahwa :

“Fasilitas pendukung tidak memadai, tempat parkir tidak memadai, saat ini ditutup tgl 26 Februari 2022 sampai waktu yang belum ditentukan, karena ada kepadatan pengunjung pada tanggal 27-28 Februari 2022, pengunjung dibiarkan masuk hingga penuh sesak tanpa melihat kondisi didalam tempat wisata.”(<https://www.google.com/maps/contrib/11337311013791390625?hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwjyJyA1sn2AhUM6nMBHYvfA8EQvvQBegQIARBq>. Diakses Pada 11 Maret 2022)

Hal ini juga terlihat dari terbatasnya atraksi yang disediakan. Di Wisata Lontar Sewu untuk sebuah atraksi sangat kurang, seharusnya di sebuah wisata banyak berbagai atraksi berupa sirkus, berupa sirkus, pertunjukkan pameran hewan, pameran karya lukisan dan berbagai macam atraksi lainnya. ulasan yang disampaikan oleh Dwiputri Wistariningrum selaku wisatawan Lontar Sewu yang mengatakan bahwa :

“Sebenarnya tempatnya bagus, bersih, terjangkau juga. Tapi satu pengalaman yg engga mengenakan waktu naik wahana tagada, pada saat wahana dimainkan pegawai laki" yg jumlahnya sekitar 5 orang kalau engga salah mengambil video dan tertawa" dan itu termasuk pelecehan dan itu engga sopan sama sekali. Tolong untuk pengelola lontar sewu lebih selektif memilih pegawai.”

(https://www.google.com/maps/contrib/116168236581167167434?hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwiDqN_51Mn2AhUHINgFHcmqB6AQvvQBegQIARA3, Diakses Pada 11 Maret 2022)

Ulasan yang disampaikan oleh Nurullah Rizqi Rahmat selaku wisatawan Lontar Sewu yang mengatakan bahwa :

“Wahana banyak yang kurang terawat seperti lingkaran berputar, bunyinya seperti mau rusak, buruk sekali..
(<https://www.google.com/maps/contrib/106263691705572699044?hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwjyrJyA1sn2AhUM6nMBHYvfA8EQvvQBegQIARAO>, Diakses Pada 11 Maret 2022)

Selain itu, pengembangan yang sebaiknya terus dilakukan pada obyek wisata ini dapat dilakukan dengan memperbanyak wahana permainan dan menyediakan toko khas oleh-oleh dari Lontar Sewu. Pengembangan ini dapat dilaksanakan mengingat bahwa potensi wisata pada obyek ini belum digali sepenuhnya. Dengan kondisi geografis sekitar obyek wisata yang merupakan area persawahan, solusi yang dapat diterapkan adalah BUMDes membangun jembatan pelangi sebagai obyek wisata yang meningkatkan potensi kunjungan wisatawan.

Lontar Sewu dipilih sebagai obyek wisata potensial karena Wisata Lontar Sewu ini berdiri di tengah-tengah persawahan yang sangat luas dengan pemandangan yang terhampar begitu luas, Namun pemandangan ini tidak dapat dinikmati dengan baik ketika siang hari mengingat lokasi obyek wisata ini yang panas dan berdebu. Lokasi wisata ini sudah dapat dijangkau dengan menggunakan petunjuk jalan baik berupa papan penunjuk arah maupun google maps. Namun, transportasi untuk menuju lokasi ini terbatas tanpa adanya angkutan umum yang tersedia sehingga mengharuskan pengunjung yang datang menggunakan kendaraan pribadi.

Jika dikaji lebih jauh, pemberdayaan pariwisata merupakan salah satu keharusan di masa perkembangan teknologi yang semakin cepat ini. Hal ini mengingat, wisata termasuk aspek kebutuhan rohani manusia yang sifatnya terus bergeser dan semakin diminati. Bentuk pengembangan yang dapat dikembangkan adalah dengan menerapkan pemberdayaan partisipatif. Artinya, pemberdayaan yang dilakukan dengan membuat perencanaan partisipatif (Ahmad Mustanir, 2019).

Upaya pengembangan desa wisata menjadi suatu alternatif pariwisata berbasis potensi desa yang terkait dengan kelestarian lingkungan, tradisi, kebudayaan, serta pemberdayaan masyarakat di desa tersebut (Dwiridhotjahjono et al., 2019). Adanya peran masyarakat pada upaya pengembangan desa wisata dapat menciptakan iklim pariwisata yang berkelanjutan tidak hanya pengembangan wisata untuk perekonomian tapi juga melestarikan apa yang sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu saat ini pemerintah mengencarkan pengembangan pariwisata lokal dengan konsep desa wisata untuk memberdayakan, meningkatkan perekonomian, dan melestarikan budaya masyarakat lokal (Prihastha & Suswanta, 2020).

Merujuk pada hal tersebut, penulis memiliki ketertarikan tinggi untuk mengkaji lebih komprehensif, khususnya terkait dengan Pengembangan Objek Wisata Lontar Sewu oleh BUMDes Hendrosari. Adapun judul dari penelitian ini adalah **“Pengembangan Objek Wisata Lontar Sewu oleh BUMDes di Desa Hendrosari Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik”**.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada penjabaran di dalam latar belakang, maka rumusan masalah yang disusun oleh penulis pada penelitian ini adalah “Bagaimana Pengembangan Objek Wisata Lontar Sewu oleh BUMDes di Desa Hendrosari Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari pelaksanaan penelitian penelitian ini adalah “Untuk mengetahui, menganalisis, dan mendiskripsikan Pengembangan Objek Wisata Lontar Sewu oleh BUMDes Hendrosari Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik”.

1.4 Manfaat Penelitian

Merujuk pada penjabaran tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan mampu menyuguhkan manfaat seperti berikut.

1 Manfaat Teoriti

Bagi Badan Usaha Milik Desa Hendrosari

Penelitian ini diharapkan mampu menyuguhkan suatu informasi, saran, serta masukan kepada pemerintah desa serta BUMDes Hendrosari terkait dengan pengembangan objek, yaitu Desa Wisata Lontar Sewu, agar objek tersebut nantinya mampu dikembangkan lebih massif lagi, sehingga terdapat suatu dampak positif terhadap perekonomian masyarakat desa.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Penulis

Penelitian ini mampu menyuguhkan suatu pengalaman serta pengetahuan baru bagi penulis dan menjad bahan referensi terkait dengan penelitian selanjutnya.

b. Untuk Universitas/Perguruan Tinggi

Penelitian ini dapat menjadi suatu referensi serta informasi untuk mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang hendak melaksanakan penelitian serupa.

c. Untuk Pemerintah Kabupaten Gresik

Penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi dan gambaran kepada segenap Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik untuk memperhatikan dan meningkatkan program Pengembangan Objek Wisata yang ada di KabupatenGresik khususnya Lontar Sewu di Desa Hendrosari.